

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019
PENGADILAN TATA USAHA NNEGARA SERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	45 perkara	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. b. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	45 perkara	-

		c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%					
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%					
		e. Jumlah Eksekusi Tepat Waktu	100%					
		f. Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	100%					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara prodeo	1 perkara	450.000
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang sedehana, transparan dan akuntabel.	45 perkara	-
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Penanganan Laporan	100%	-

	eksternal.	c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.	100% 100%			Pengaduan dan Audit Kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.		
6.	Peningkatan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.	100% 100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100%	6.821.376.000

7.	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset .	<p>a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima</p> <p>b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)</p> <p>c. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran Aparatur Mahkamah Agung	100%	83.000.000
----	---	---	---	--	--	---	------	------------